

**EFEKTIVITAS SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKIR) DALAM
PENGELOLAAN PARKIR DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ZULHILMI

NIM. 180802023

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Muhammad Zulhilmi
NIM : 180802023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 Juli 2000
Alamat : Dusun Bungong Meulu, Gp. Emperum,
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini. Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan


32AKX688942578 **MUHAMMAD ZULHILMI**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKIR) DALAM
PENGELOLAAN PARKIR DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MUHAMMAD ZULHILMI

180802023

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II

 22
11 023

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007



Eka Janyar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
EFEKTIVITAS SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKIR)
DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023
29 Jumadil Awal 1445

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Eka Januar, M. Soc, Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji I,

Penguji II,

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Arij Arif, M.A.
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Winda Othij Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Permasalahan perparkiran sering kali terjadi di berbagai kota di Indonesia, mulai dari penggunaan badan jalan yang dapat membuat kemacetan jalan sampai ke kebocoran dari sisi juru parkir, parkir merupakan suatu cara agar dapat meningkatkan PAD, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan pengembangan sistem parkir yaitu dengan menerapkan parkir elektronik non-tunai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk melihat Efektivitas sistem parkir elektronik (E-Parkir) dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan parkir elektronik tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Sistem Pelayanan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh telah berjalan selama 1 tahun di Kota Banda Aceh, tetapi dalam pelaksanaannya sistem e-parkir ini masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya pengguna parkir yang masih belum mengetahui mengenai sistem pembayaran online yang diterapkan di area parkir tersebut, hal ini juga disebabkan oleh tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah dan aksesibilitas terhadap alat pembayaran elektronik yang belum terbiasa. Adapun Faktor penghambat dari parkir elektronik ini masih belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelayanan E-parkir dan penghambat lain masih kurangnya pemahaman tentang sistem parkir elektronik, dan perilaku tidak patuh seperti menerobos palang. Selanjutnya, masalah kelistrikan juga merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja sistem parkir elektronik.

Kata Kunci : *Efektifitas, E-Parkir non-tunai , DISHUB Kota Banda Aceh*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Banda Aceh” Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlakul karimah serta taat kepada Allah SWT.

Proposal skripsi ini disusun guna untuk menyelesaikan salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, masukan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.Si, Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendidik, membimbing, memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. Selaku Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarah, memberikan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu mengarah, memberikan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan serta bimbingan selama rutinitas perkuliahan.
8. Serta yang paling istimewa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua yang telah mengayomi, mendidik, membina, serta selalu memanjatkan do'a dan terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
9. Teman-teman mahasiswa baik kating maupun seangkatan 2018 yang penulis cintai karna dapat saling membantu, bekerja sama dan memberikan masukan untuk penulis.

Peneliti tidak dapat membalas seluruh kebaikan yang diberikan kepada peneliti, tetapi hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan seluruh kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun yang membacanya.

Banda Aceh, 31 Juli 2022

Penulis

Muhammad Zulhilmi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian yang Relevan.....	10
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1. Teori Efektivitas.....	12
2.2.2. Sumber Daya Manusia	15
2.2.3. Konsep Parkir	17
2.2.4. Sistem Parkir Elektronik	19
2.3. Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1. Pendekatan Penelitian.....	22
3.2. Fokus Penelitian	22
3.3. Lokasi Penelitian.....	23
3.4. Jenis dan Sumber Data	23

3.4.1 Data Primer	23
3.4.2 Data Sekunder.....	24
3.5 Informan Penelitian.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7. Teknik Analisis Data	26
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.1.1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	29
4.1.2. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	30
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh...	31
4.1.4. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	32
4.2. Hasil Penelitian	35
4.2.1. Ketepatan Sasaran Program.....	36
4.2.2. Sosialisasi Program.....	39
4.2.3. Tujuan Program.....	42
4.2.4. Pemantauan Program.....	44
4.2.5. Faktor Penghambat	47
4.3. Pembahasan Penelitian.....	53
4.3.1. Efektivitas Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh.....	53
4.3.2. Faktor Penghambat Dari Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh	58
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan.....	10
Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Efektivitas Sistem ParkirElektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.....	22
Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat Dishub Kota Banda Aceh Dalam Pemanfaatan E-Parkir	23
Tabel 3.3. Informan Penelitian.....	25



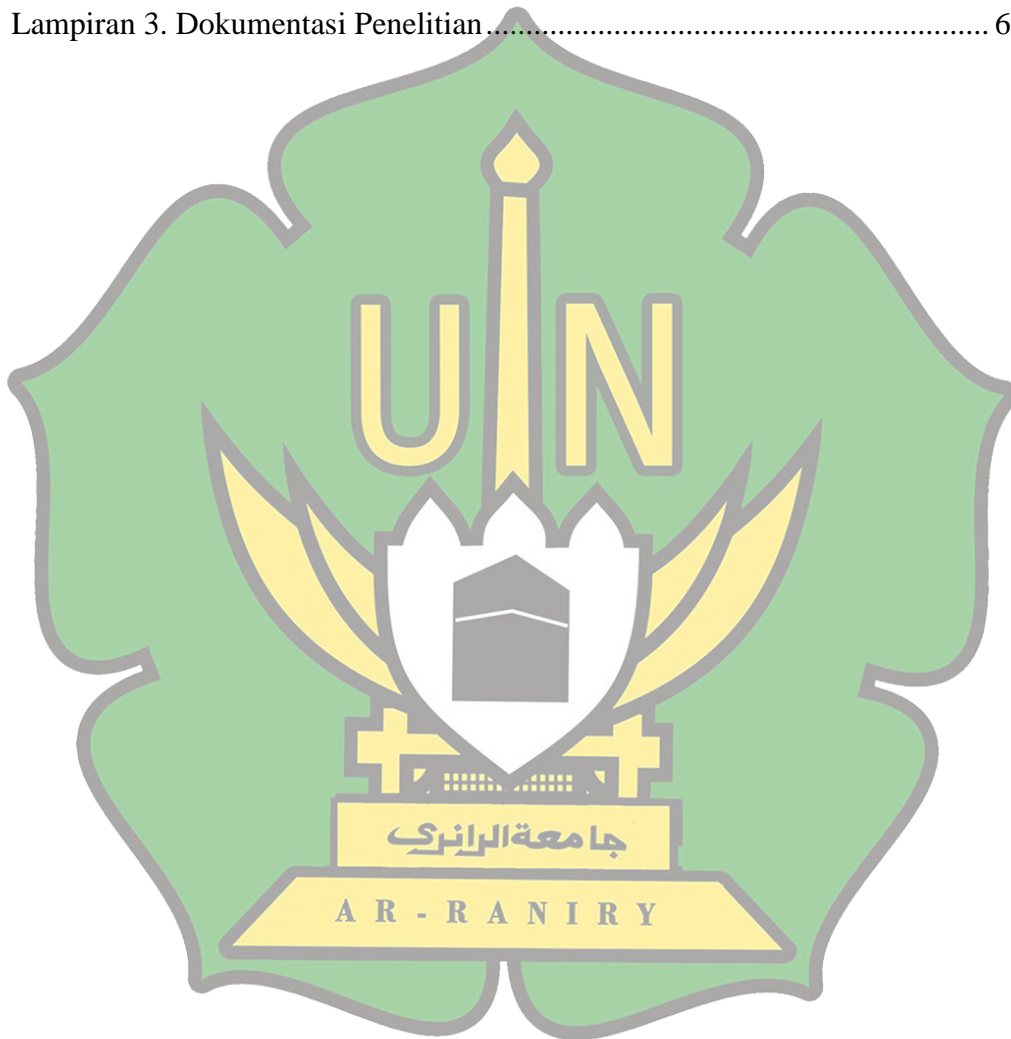
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dishub Kota Banda Aceh.....	34
Gambar 4.2 Palang E-Parkir Non-tunai	51
Gambar 4.3 Pos E-Parkir Non-tunai	52
Gambar 4.4 Suasana E-Parkir Non-tunai	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP	67
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	68
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah banyak aspek kehidupan. Hampir semua sektor telah mengadopsi teknologi, termasuk dalam penyediaan layanan publik. Pemanfaatan teknologi dalam layanan publik, yang sering disebut sebagai e-government, memungkinkan penyelenggaraan layanan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *E-government* merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah aktivitas pemerintah dengan tujuan meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.¹

Transformasi pelayanan publik dari model manual dan sederhana ke arah e-government memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan konsep *smart city*. Beberapa kota di Indonesia telah memimpin inisiatif ini dengan menerapkan konsep *smart city* melalui solusi *e-government*. Konsep *smart city* menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan.² Salah satu pelayanan berbasis elektronik adalah penerapan elektronik parkir di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Aceh.

Perparkiran merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan-kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi, akan terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga

¹ Silvanda, Handri. *Efektivitas sistem parkir elektronik (e-parkir) dalam pengelolaan parkir di kota surakarta*. Journal of Governance and Policy Innovation. Vol 1, No 1. 2021.

² *Ibid*

menyebabkan kemacetan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran.³

Pemberlakuan sistem e-parkir merupakan langkah inovatif dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan ruang parkir di perkotaan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan efisiensi dalam manajemen parkir semakin mendesak. E-parkir hadir sebagai solusi modern yang menggunakan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses pengawasan dan pengelolaan ruang parkir. Dengan penerapan sistem ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran parkir secara elektronik, menghindari antrian panjang, dan mengoptimalkan waktu parkir.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa pengaturan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diatur dengan peraturan daerah (Qanun). Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan, khususnya yang berasal dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin

³ Naufal Imaduddin, *Skripsi, "Efektivitas Program Terminal Perkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Tentang Program Terminal Parkir Elektronik di Jl.Burangrang)"*, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2021). Hlm 9-10

meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Pengelolaan parkir sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengatur parkir di perkotaan termasuk pengelolaan lahan parkir. Apabila Pengelolaan parkir dapat berjalan dengan efektif dan dikelola dengan baik tentunya juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Retribusi adalah salah satu dari pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum. Dalam Pasal 1 Qanun tersebut menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kemudian Qanun tersebut juga menjelaskan mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir serta tata cara dalam proses pemungutan yaitu pada Pasal 20 yang berisikan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya

yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.⁴

Maka dari itu, agar mendapat kejelasan mengenai jumlah tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir yang menggunakan jasa parkir melalui karcis yang telah dikeluarkan oleh juru parkir, sehingga adanya keterbukaan terhadap suatu pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu qanun tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam mengelola retribusi parkir di Kota Banda Aceh, supaya tidak terjadi bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Seiring dengan berkembangnya zaman mempengaruhi kemajuan teknologi yang membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi memberikan manfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya khususnya pada saat menjalankan pekerjaan. Pemerintah Pusat dan Daerah dituntut agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat, Maka dari itu dengan adanya perkembangan teknologi informasi pemerintah mulai memanfaatkan E-Government. Menurut Nugraha E-Government merupakan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan intruksi

⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum dan Tempat khusus parkir

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-Government, bahwasannya pengembangan E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Adanya dasar aturan tersebut menciptakan suatu inovasi pelayanan publik yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti pelayanan yang ada di bidang transportasi dan publik khususnya di sektor perparkiran. Muncul suatu inovasi yaitu *Elektronic Parking* atau Parkir Elektronik yang biasa dikenal dengan (E-Parkir). Menurut Hayati E-Parkir adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir secara elektronik. Tujuannya ini untuk mengurangi pungutan liar yang menyebabkan tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah. Manfaat dari E-Parkir untuk mewujudkan pelayanan perparkiran yang efektif dan efisien bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk menuju smart city.⁵

Penerapan sistem e-parkir memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban parkir di lingkungan perkotaan. Dengan adanya teknologi ini, manajemen parkir dapat dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang memberikan informasi real-time mengenai ketersediaan tempat parkir. Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, adanya

⁵ Aulia Billqis, Retno Suryawati, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, “Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta”, Volume 2, Nomor 2, 2022. Hlm: 287

e-parkir juga untuk menertibkan kendaraan di berbagai tempat parkir agar terlihat rapi.

Di Banda Aceh E-Parkir sudah diresmikan pada tanggal 28 Desember 2022 di 3 lokasi yaitu di Jalan Tp Nyak Makam, Jalan Prof Ali Hasyimi, dan Jalan Sri Ratu Safiatuddin, program parkir non tunai ini dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di pinggir jalan agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya bagi masyarakat kota, parkir non tunai ini juga dapat meminimalisir bocornya PAD dari sektor pembayaran retribusi parkir dan kemudian masyarakat terhindar dari praktik juru parkir liar dan sebagai upaya penertiban parkir di Kota Banda Aceh agar terlihat lebih rapi dan mudah untuk dijangkau. Penerapan kawasan E-Parking ini mendapat dukungan dari PT Module Intracs Yasatama sebagai pemegang hak atas aplikasi parking. Pemko juga mendapatkan dukungan dari DPRK, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku pemegang hak atas SAM Development Kartu Elektronik sebagai alat bayar parkir non tunai, dan juga dari Bank Aceh Syariah serta Bank Syariah Indonesia (BSI).⁶

Namun penggunaan mesin parkir elektronik ini pelaksanaannya masih belum efektif, dikarenakan belum adanya dorongan dari juru parkir untuk melakukan perubahan dalam melayani penggunaan jasa parkir dengan menggunakan mesin parkir elektronik. Masyarakat yang belum mempunyai uang elektronik untuk membayar tarif parkir juga merupakan salah penyebabnya. Dan dimana seringkali

⁶ Imamunnisa Farha, <https://www.ajnn.net/news/dishub-banda-aceh-mulai-berlakukan-e-parkir/index.html> di akses pada 02/07/2023

mesin parkir yang ada dikawasan sering tidak berfungsi terutama pada palang parkir mesin parkir elektronik tersebut.

Menurut Irwansyah, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh menjelaskan bahwa pelaksanaan parkir masih belum maksimal di Banda Aceh, dalam pelaksanaannya dilapangan, parkir masih belum mencapai target untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini anggaran yang masuk dari parkir hanya berkisaran 50% saja atau sekitar 5-6 milyar saja, ia menjelaskan bahwa kawasan parkir di Kota Banda Aceh telah dibangun dengan anggaran yang cukup besar, tetapi dalam pelaksanaan tetap saja belum optimal. ia juga mengungkapkan bahwa diperlukan suatu sistem modernisasi dalam pelayanan parkir di Kota Banda Aceh, karena bila tidak dilakukan sistem tersebut, maka PAD dari parkir di Kota Banda Aceh akan tetap tidak bisa dicapai 100%.

Berdasarkan Permasalahan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk dapat mengkaji secara lebih jauh lagi tentang bagaimana Pemanfaatan E-Parkir sebagai bentuk inovasi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengangkat judul “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Banda Aceh”. Dengan harapan agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, peneliti mengidentifikasi masalah beberapa hal yang ingin dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan inovasi pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan E-Parkir masih perlu diperhatikan lagi untuk mencapai sebuah efektivitas program pelayanan tersebut.
2. Dalam pelaksanaannya E-Parkir dilapangan, peneliti akan mengamati bagaimana kendala atau penghambat yang dihadapi Dishub Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Aplikasi Parkir atau Parkir Elektronik.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas sistem pelayanan Parkir Elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ?
2. Apa saja faktor penghambat dari sistem pelayanan parkir elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas sistem pelayanan Parkir Elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk Mengetahui Apa saja faktor penghambat dari sistem pelayanan parkir elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan bacaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap program yang di keluarkan oleh pemerintah yang pada hakikatnya juga untuk kepentingan masyarakat publik. Sebagai bahan masukan bagi seluruh pihak terkait untuk menciptakan kinerja yang efektif.

b. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk merumuskan Efektivitas dari Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut untuk program Parkir Elektronik.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas merupakan cara untuk mengukur suatu pencapaian dengan melihat berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi tersebut, apabila organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah berjalan efektif.
2. Pengelolaan merupakan Suatu usaha atau proses perencanaan yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi dalam melakukan kegiatan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. E-Parkir merupakan Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir secara Elektronik untuk Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir untuk kendaraan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1.
Penelitian yang Relevan

Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Mubdi Dzuwhandy, Efektivitas Penggunaan Parkir Elektronik (E-Parking) di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2021	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah dengan adanya sebuah sistem pemungutan parkir elektronik ini, dapat meningkatkan suatu pelayanan pemerintah kepada masyarakat, transparan, efisien, dan efektif dalam pengelolaan pajak parkir di Kota Makassar.	Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelayanan pemerintah dalam memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan melihat peningkatan PAD, Sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pelayanan yang sudah diterapkan apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Ulfi Dwi Nur Utami, Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung, 2019	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program parkir elektronik ini belum efektif yang disebabkan oleh berbagai indikator. Terlihat dari sosialisasi dan koordinasi dengan pihak lain masih belum baik oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung,	Pada penelitian sebelumnya peneliti lebih berfokus pada dampak yang dihasilkan dari program mesin elektronik, perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan melihat Input dan Output dari sistem pelayanan

		belum sesuai dengan tujuan awal, dan menimbulkan dampak negatif terhadap juru parkir.	parkir elektronik dan melihat faktor penghambat atau kendala dari sistem parkir elektronik.
Naufal Imaduddin, Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung, 2021	Kualitatif Deskriptif	Hasil menunjukkan bahwa kinerja output dan kinerja outcome kebijakan terminal parkir elektronik di Kota Bandung belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum tercapainya target capaian retribusi parkir. Meskipun begitu terjadi peningkatan retribusi parkir yang merupakan dampak positif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi tidak berhasilnya kebijakan masuk adalah kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kinerja kebijakan ini harus ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi peningkatan retribusi parkir, meminimalkan retribusi parkir liar dan menjaga administrasi perparkiran.	Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada lima indikator program menurut Kettner, Moroney dan Martin yang terdiri dari: Upaya/Usaha (effort), Efisien biaya (cost efficiency), hasil (result), efektivitas biaya (cost effectiveness), dan dampak (impact). Sedangkan penelitian ini berfokus pada indikator Efektivitas Menurut Budian dengan melihat Ketepatan sasaran program, Tujuan program, Sosialisasi program, dan Pemantauan program.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut efektif apabila tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Menurut Richard M.Steers, efektivitas merupakan tingkat kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya atau pencapaian sasarnya. Efektivitas dalam dunia riset Ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktifitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektivitas sering ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja.⁷

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas bahwa efektifitas merupakan langkah atau tahapan yang dilakukan dalam menjalankan suatu program atau tujuan akhir yang sudah direncanakan di awal melalui pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat dikatakan efektif jika tujuan atau perencanaan diawal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

⁷Yogi Eka Prastiya, Skripsi, “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”, (Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014). Hlm: 79

Dapat dikatakan tidak efektif apabila tujuan diawal tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan.

2. Faktor Penentu Efektivitas

Adapun maksud lain dari efektivitas merupakan hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Adapun faktor Penentu Efektivitas yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktu organisasi yaitu suatu susunan yang normal dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan yang dimaksud kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor ini dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

⁸ Zahratin Nadira, Skripsi, "Efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), Hlm: 13

Sementara Menurut Siagian mengemukakan ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif ada beberapa ciri-ciri, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai .
- b. Kejelasan Strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.⁹

Adapun indikator yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini Teori Efektivitas Menurut Budiani untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:¹⁰

1. Ketetapan sasaran program yaitu melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program yaitu melihat kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran peserta program pada khususnya.

⁹ Musyarrafah, Skripsi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di SMP Aisyiah Sungguminasa Kabupaten Gowa”,(Makassar,Universitas Muhammadiyah Makassar,2021). Hlm: 16

¹⁰ Agrio Scivo Kowaas, Novie Pioh, Neni Kumayas, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, “Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon”, Volume 2 No. 2Tahun 2017, Hlm: 4

3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

A. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan diamati dengan cara tersebut sehingga waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu. Ada 5 prinsip pendekatan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai berikut:¹¹

1. SDM merupakan kekayaan yang paling penting, yang dimiliki oleh organisasi, di mana manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut.
2. Keberhasilan sangat penting dicapai manakala peraturan atau kebijakan dan prosedur, serta mekanisme kerja, yang berkaitan dari manusia dari perusahaan tersebut paling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan pencapaian strategis.

¹¹ Prof. Dr. H. Abdurrahmat Fathoni, M.Si., Prof. Dr. H.M. Abdul Somad, M.Pd., Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., *Manajemen Sumber Daya Manusia (Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Kinerja Pegawai, Pengawasan)*, (Jatinangor, Alqaprint Jatinangor, 2016), Hlm: 7-8

3. Budaya dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian terbaik.
4. MSDM berhubungan dengan integrasi menjadikan semua anggota organisasi terlibat untuk mencapai tujuan.
5. Dari keempat prinsip tersebut harus tertanam dalam diri setiap anggota (manusia) ketakwaan dan keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Simamora Manajemen Sumber Daya Manusia adalah desain dan implementasi sistem perencanaan dalam menyusun karyawan, pengembangan karyawan, Pengelolaan karir, Evaluasi kinerja, Kompetensi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik.

Ada Empat tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:¹²

1. Tujuan Sosial

Agar organisasi atau perusahaan bertanggungjawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya.

2. Tujuan Organisasional

Sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.

3. Tujuan Fungsional

¹² Eulin Karlina Rosento, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020) Hlm: 2

Mempertahankan kontribusi departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Tujuan Individual

Tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi.

2.2.3. Konsep Parkir

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan Pada pasal 1 (15) bahwa “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.¹³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 (32) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹⁴ Sedangkan ditinjau menurut keputusan menteri perhubungan yang tertera dalam nomor: KM 66 tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum¹⁵ Pasal 1:

- 1) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 2) Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- 3) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang di usahakan sebagai kegiatan usaha

¹³ Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 32

¹⁵ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: MK 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

Regulasi parkir di Kota Banda Aceh di atur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Pada Pasal 1 ayat 10 telah dijelaskan bahwa “Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan dan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Kota”.¹⁶

Penyelenggara parkir berdasarkan Pasal 43 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁷

- 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok
- 3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan Kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan dan tatacara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

¹⁶ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sarana Parkir buat universal di luar tubuh jalur bisa berbentuk gedung parkir serta/ ataupun Halaman parkir. Sedangkan penetapan posisi serta pembangunan sarana parkir buat universal bisa dicoba dengan mencermati rencana universal tata ruang wilayah, analisis akibat kemudian lintas keselamatan serta kelancaran dalam lalu lintas, serta kemudahan untuk para pengguna jasa parkir. Penyelenggaraan sarana parkir buat universal bisa dicoba oleh perseorangan masyarakat negeri Indonesia ataupun tubuh hukum Indonesia berbentuk, usaha spesial perparkiran ataupun penunjang usaha pokok. Penyelenggara parkir buat universal bisa memungut bayaran terhadap pemakaian sarana ataupun owner kendaraan yang diusahakan.¹⁸

2.2.4. Sistem Parkir Elektronik

Konsep Parkir elektronik dilakukan untuk mewujudkan program pemerintah, Sistem parkir elektronik ini merupakan program besar dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi. Sistem parkir elektronik yaitu sebelum para pengendara memarkir kendaraannya seperti biasa di parkiran yang telah di sediakan, pengguna parkir elektronik mendatangi mesin parkir elektronik yang sudah di sediakan untuk memasukkan nomor plat kendaraan, jenis kendaraan, dan waktu mulai parkir. Saat akan meninggalkan lokasi parkir, pengendara akan kembali ke mesin parkir elektronik untuk memasukkan data waktu meninggalkan lokasi. Sistem parkir elektronik diharapkan mampu diterapkan di pusat keramaian seperti di pusat perbelanjaan, pusat kota, pusat perekonomian.

¹⁸ Jemadil, Skripsi, "Peran DISHUB Dalam Penertiban Perparkiran Di Kota Blangkejeren Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir Dan Siyash Syari'ah" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2022). Hlm: 23

Berlangsungnya parkir elektronik untuk menjawab persoalan umum parkir seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat pada juru parkir dan Pemerintah dalam memberikan kepastian tarif, transparansi kenyamanan dan keamanan pada masyarakat pengguna jasa. Selain itu parkir nakal tidak bisa sembarangan menarik parkir diluar ketentuan.¹⁹

No.	Lokasi E-Parkir Non-Tunai Di Kota Banda Aceh
1	Jl.Panglima Nyak Makam
2	Jl.Prof.Ali Hasymi
3	Jl.Ratu Safiatuddin

¹⁹Mubdi Dzuwhandy, Skripsi, *“Efektyitas Penggunaan Sistem Pemungutan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makasar”*, (Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022), Hlm: 16-17

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah satu jenis pendekatan penelitian yang digunakan sebagai prosedur penemuan yang dilakukan tanpa menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Maka dalam hal ini pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menjelaskan tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, atau hubungan timbal balik.²⁰

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 3.1.
Dimensi dan Indikator Efektivitas Sistem Parkir Elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh

No	Dimensi	Indikator
1	Ketepatan sasaran program	a. Penyelenggara E-Parkir b. Masyarakat Pengguna E-Parkir
2	Sosialisasi Program	a. Tujuan Program b. Pemantauan Program

Sumber: Teori Efektivitas Menurut Budiani, (2007)

²⁰Salim, Syahrin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hlm 41.

Tabel 3.2.
Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat Dishub Kota Banda Aceh Dalam Pemanfaatan E-Parkir

No	Dimensi	Indikator
1	Internal	a. Regulasi b. Kurangnya Anggaran
2	Eksternal	a. Masyarakat b. Jaringan

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2023

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan di 3 Kawasan yang sudah diterapkan Parkir Elektronik yaitu di Jl. Panglima Nyak Makan, Jl. Prof Ali Hasyimi, dan Jl. Ratu Safiatuddin.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan dari sebuah wawancara dan dari hasil pengamatan langsung di tempat penelitian.

Adapun yang menjadi informan dan keterangan yang akan didapatkan dalam data primer meliputi: Keterangan Kepala Bagian Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, hal tersebut disebabkan karena ia lebih menguasai semua permasalahan yang ada di bagian perparkiran dan mempunyai tugas pokok dalam bidang parkir. Selanjutnya adalah bagian pengawas parkir, karena ia lebih sering melihat langsung kondisi dan kendala yang ada di lapangan pada saat pengawasan. Kemudian adalah juru parkir,

karena juru parkir merupakan orang ketiga dalam melakukan pelayanan parkir dan mengetahui kondisi langsung dilapangan. Terakhir meliputi masyarakat, hal ini sebabkan karena masyarakat merupakan pengguna jasa atas inovasi pelayanan yang diberikan dinas perhubungan yang merasakan dampak langsung dari sistem e-parkir.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan (buku, jurnal, media) yang berkaitan dengan Efektifitas Sistem Parkir Elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²²

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), Hlm: 225

²² Bayu Arief Rachman, Skripsi, "*Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Dalam Mendapatkan Penghargaan Pelayanan Prima Grade A*", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023). Hlm: 40

Tabel 3.3.
Informan Penelitian

Informan	Jumlah Orang	Keterangan
Kepala Bagian Parkir	1	Karena kepala bagian parkir lebih menguasai semua permasalahan yang ada di bagian perparkiran dan mempunyai tugas pokok dalam bidang parkir.
Bagian Pengawas Parkir	1	Karena Waskir lebih sering melihat langsung kondisi dan kendala yang ada di lapangan pada saat pengawasan.
Juru Parkir	3	Karena juru parkir merupakan orang ketiga dalam melakukan pelayanan parkir dan mengetahui kondisi langsung dilapangan.
Masyarakat	3	Karena Masyarakat merupakan pengguna jasa atas inovasi pelayanan yang diberikan Dishub yang merasakan Dampak Langsung dari Sistem E-Parkir.
Jumlah	8	

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sering disebut dengan metode pengamatan yang artinya memperhatikan sesuatu secara langsung atau melihat sendiri di lapangan. Melalui observasi peneliti akan meneliti tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan suatu informasi tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari sebuah kelompok dan individu.²³ Dokumentasi adalah proses pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai bentuk bukti informasi sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun sejumlah dokumentasi yang akan diambil oleh peneliti dapat berupa peraturan, Standar Operasi Pelayanan, Foto-foto dan lain sebagainya.

3.7. Teknik Analisis Data

Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

²³ *Ibid...*, Hlm: 240

1) Reduksi data

Adalah sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan.

2) Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Penarikan kesimpulan

Ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.²⁴

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk

²⁴ Hardani, Ddk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Cv, Pustaka Ilmu, 2000), Hal. 163

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh²⁵. Metode untuk memverifikasi keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber, Metode ini melibatkan proses memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pemeriksaan untuk melakukan untuk memastikan keakuratan data dan mendukung keseluruhan penelitian.



²⁵ Al Mufakkir Budiman (2022), Skripsi, Peran pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa paya kecamatan triengadeng kabupaten pidie jaya. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Hlm : 39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terletak di Jalan T. Nyak Arief No 30 Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga pemerintah setempat yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan di bidang transportasi dan layanan masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.²⁶

Kota Banda Aceh, yang merupakan ibukota Provinsi Aceh, memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan menjadi *leading sector* atau sektor utama dalam menyelenggarakan pelayanan transportasi, serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kota Banda Aceh. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi mengenai layanan transportasi kepada masyarakat.

²⁶Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh <https://Dishub.Bandaacehkota.Go.Id/Page-Sejarah.Html> Di Akses Pada Tanggal 20 Juli 2023

Meskipun Dinas Perhubungan dihadapkan pada keterbatasan anggaran, upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mencari sumber dana dari berbagai sumber lainnya guna mendukung program-program yang telah ditetapkan. Dengan begitu, program-program tersebut dapat tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Sejak didirikan, Dinas Perhubungan juga telah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Upaya ini menunjukkan komitmen dinas dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur transportasi yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan adanya regulasi dan dukungan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan Dinas Perhubungan dapat terus berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi dan mobilitas di Kota Banda Aceh, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat.

4.1.2. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

1. Visi

Adapun visi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan adalah:

“Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal dan Akurat
Berbasis Informasi dan Teknologi”

2. Misi

Misi adalah suatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi ini diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh. Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengacu pada misi Pemerintah Kota Banda Aceh terutama untuk periode tahun 2017-2022, yaitu Misi 6 “Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggungjawab serta berakhlak mulia.
2. Meningkatkan Pelayanan, sarana & prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.
4. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.²⁷

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah instansi teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kota di

²⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2020

bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.²⁸

4.1.4. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

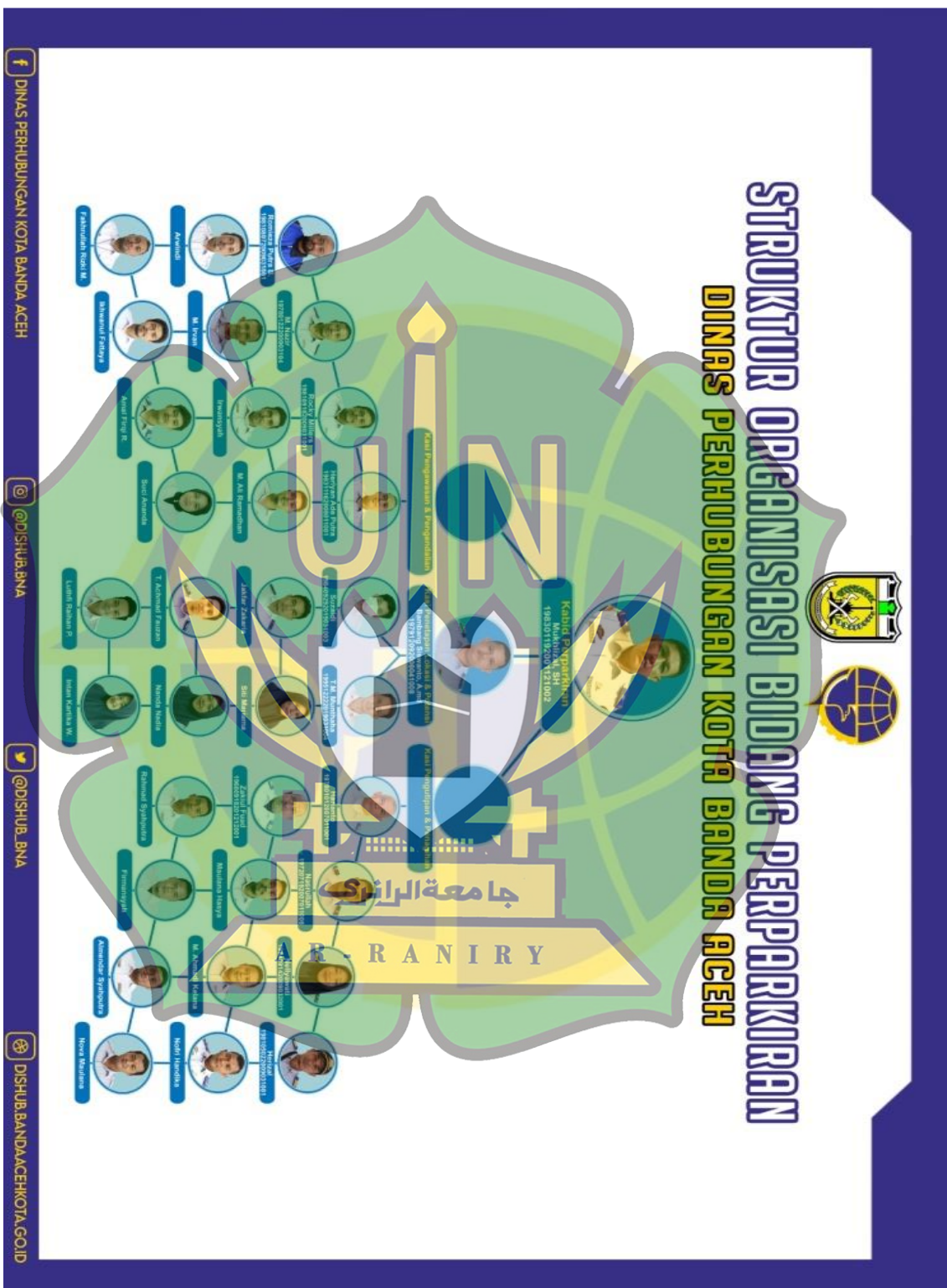
Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Seksi Angkutan

²⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2020

3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:
 1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Sarana
 - e. Bidang Perparkiran, membawahi:
 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
 2. Seksi Pengutipan dan Penagihan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:
 1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan
 2. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.²⁹

²⁹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dishub Kota Banda Aceh
Sumber: Pegawai Dishub Kota Banda Aceh

4.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengacu pada temuan atau data yang ditemukan oleh peneliti setelah melakukan investigasi atau penyelidikan sistematis terhadap suatu topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Hasil penelitian berisi analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan melalui berbagai metode penelitian, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Maksud dari hasil penelitian adalah memberikan informasi dan bukti empiris yang dapat mendukung atau membantah hipotesis penelitian. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi kontribusi baru dalam pengetahuan di bidangnya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, atau sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Adapun hasil penelitian tentang Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh dirumuskan dalam indikator efektivitas menurut Budiani yang telah di pilih oleh peneliti. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan penelitian.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir adalah biaya atau tarif yang dikenakan kepada pengguna kendaraan yang memanfaatkan area parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Tujuan dari qanun ini

adalah untuk mengatur tata cara penggunaan dan pembayaran retribusi parkir tersebut, serta mengatur berbagai aspek terkait manajemen parkir guna meningkatkan pengaturan lalu lintas dan pengelolaan parkir di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai sistem e-parkir di Kota Banda Aceh masih belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan karena metode pembayarannya masih bisa dilakukan dengan sistem non-tunai di area parkir tersebut. Selanjutnya, minimnya informasi yang beredar di masyarakat mengenai e-parkir ini mengakibatkan sistem e-parkir ini belum dapat dijalankan secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tergambar bahwa implementasi program e-parkir di Kota Banda Aceh masih dapat dikategorikan sebagai inisiatif yang relatif baru. Dalam realitasnya, program ini belum mencapai tingkat optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tingkat pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya terbentuk terkait konsep e-parkir, serta infrastruktur teknologi yang mungkin belum sepenuhnya siap untuk mendukung sistem ini. Selain itu, perlu diperhatikan aspek regulasi dan penegakan hukum yang dapat memengaruhi keefektifan program e-parkir ini.

4.2.1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketika suatu program

diluncurkan, para pembuat kebijakan atau pelaksana program menetapkan sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai hasil tertentu. Sasaran ini dapat berupa target dalam bentuk angka atau pencapaian kualitatif yang spesifik dan terukur.

Ketepatan sasaran program melibatkan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk mengukur sejauh mana peserta program berhasil mencapai sasaran tersebut. Namun, jika pencapaian tidak mencapai target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami kendala atau hambatan yang menyebabkan ketidakberhasilan. Selanjutnya, program dapat disesuaikan atau ditingkatkan untuk meningkatkan kemungkinan mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kilas dibalik kenapa dari parkir manual kita berencana beralih fungsi ke parkir elektronik, dasar parkir elektronik ini pengembangan, pengembangan dalam bentuk cash ke sistem tanpa ada uang cash, dalam artian uang cash begini selama ini kan kalau parkir dalam bentuk cash karena kita menempatkan juru parkir di lapangan untuk kebocoran dari sisi juru parkir itu lebih besar, dalam artian lebih besar dia hari ini dapat Rp 200.000 tapi dia sampaikan dia dapat Rp 100.000, makanya dia bisa membayar kita sedikit. Tapi kalau kita mencoba ke parkir non tunai itu lebih jelas sistemnya, pendapatannya terstruktur, hak dia juga terstruktur, PAD pun saya yakin 100% meningkat. Jadi kalau dilihat apa ini tepat atau tidak, saya rasa sangat tepat, karena kalau hanya dijalankan membayar parkir via tunai saja, masih banyak juru parkir yang pelaporannya belum jujur atas pelaporannya.”³⁰

Dari hasil wawancara di atas dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa mereka menggambarkan bahwa parkir elektronik adalah hasil dari upaya pengembangan, dengan tujuan mengubah sistem

³⁰ Hasil wawancara dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

parkir menjadi tanpa uang tunai. Alasan utama untuk melakukan perubahan ini adalah untuk mengurangi potensi kebocoran pendapatan dari sisi juru parkir. Dengan sistem parkir tunai, juru parkir seringkali tidak jujur dalam melaporkan pendapatannya, yang menyebabkan kerugian bagi pihak terkait. Dengan beralih ke sistem parkir non tunai, mereka percaya bahwa pendapatan akan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, hal ini diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Narasumber meyakini bahwa langkah ini sangat tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kejujuran dalam pengelolaan parkir.

Selanjutnya, Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menambahkan, bahwa:

“Adanya pelaksanaan e-parkir ini sangat membantu kami semuanya yang mengatur tentang sistem perparkiran di Kota Banda Aceh dan juga mendukung percepatan pelayanan untuk masyarakat, hasilnya sangat baik untuk peningkatan pendapatan daerah dari uang parkir ini, jadi kita juga menghindari pungli parkir yang kelewatan dari juru parkir untuk masyarakat, tetapi memang belum bisa untuk diterapkan ke semuanya.”³¹

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penggunaan sistem e-parkir telah membawa manfaat besar bagi kami yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem perparkiran di Kota Banda Aceh. Ini juga berkontribusi pada percepatan pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya sangat positif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui uang parkir. Selain itu, melalui sistem e-parkir, juga berhasil mengurangi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh beberapa juru parkir kepada masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi

³¹ Hasil wawancara dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

sistem e-parkir belum bisa diterapkan secara universal dan masih perlu pengembangan lebih lanjut.

4.2.2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu melihat kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran peserta program pada khususnya.

Sosialisasi program merupakan aspek yang begitu penting dalam setiap kegiatan atau proyek. Proses ini menitikberatkan pada kemampuan penyelenggara program dalam menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat umum dan secara khusus kepada calon peserta program. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif, pihak penyelenggara dapat memastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami tujuan program, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Lebih dari itu, sosialisasi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran peserta program yang telah ditentukan. Dengan menyebarkan informasi secara khusus kepada calon peserta yang berpotensi untuk berpartisipasi, pihak penyelenggara dapat meningkatkan peluang untuk melibatkan mereka yang benar-benar berkepentingan dan memenuhi syarat. Hasilnya, pelaksanaan program akan lebih efisien dan efektif, dengan dampak yang lebih besar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Kita di 2022 itu diakhir tahun kita sudah melaunching dikawasan nyak makam, dan mulai bulan 10 tahun 2022 kita sudah sosialisasi lewat baliho lewat media elektronik, di kawasan eparkir 1 bulan sebelum rencana pemberlakuan nontunai itu kita sudah sosialisasi ke masyarakat yang ada disekitar kawasan e-parkir, kita juga sudah tempel spanduk disekitar kawasan eparkir bahwa mulai hitungan desember 2022 kaawasan ini sudah berlaku nontunai dengan sistem qris, ovo, dana, link aja, dan e-money. Jadi semua alat pembayaran itu berlaku kecuali BCA, karena integrasi *sent development* dengan BCA kita gak dapat, karena BCA kan Bank yang benefitnya agak lebih besar.”³²

Dari hasil wawancara di atas dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa pada akhir tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah berhasil meluncurkan sistem e-parkir di kawasan Nyak Makam. Mulai bulan Oktober 2022, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah memulai sosialisasi melalui baliho dan media elektronik. Sebulan sebelum rencana pemberlakuan pembayaran non tunai, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan e-parkir.

Selain itu, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga memasang spanduk di sekitar kawasan e-parkir yang menginformasikan bahwa mulai bulan desember tahun 2022, kawasan ini akan menerapkan pembayaran non tunai melalui sistem QRIS, OVO, Dana, Link Aja, dan e-money. Semua metode pembayaran ini berlaku, kecuali BCA, karena integrasi dengan BCA tidak dapat terwujud.

³² Hasil wawancara dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

Selanjutnya, salah satu masyarakat yang menggunakan e-parkir juga menyampaikan hal yang sama seperti di atas, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebelumnya saya tahu tentang parkir elektronik ini diluar aceh, ada pernah saya di medan kalau sistemnya online, bayarnya lewat online, kalau di aceh ini ada yang bisa bayar uang tunai langsung, sesekali saya bayar pakek online lewat ovo, kalau di Banda Aceh ini saya tahu langsung dilapangannya, jadi saya kurang baca berita, jadi pas saya dilokasi yang saya parkir baru baca, bayarnya non tunai.”³³

Kemudian, masyarakat yang peneliti jumpai selanjutnya juga menjelaskan bahwa:

“Saya mengetahui tentang e-parkir ini melalui berita yang sempat saya baca dulu, pokoknya bacanya di internet tentang penerapan e-parkir ini, ya saya rasa sistem parkir online ini bagus ya, untuk menghindari pungli dari tukang parkir liar, tetapi pembayarannya masih bisa bayar uang cash dan bisa bayar juga lewat OVO dan dana, jadi bisa kasih uang tunai langsung juga.”

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat yang pernah menggunakan e-parkir di Kota Banda Aceh di atas dapat dipahami bahwa mereka mendapatkan informasi tentang e-parkir ini melalui berita yang dibaca sebelumnya di internet. Mereka menjelaskan bahwa sistem parkir online ini merupakan langkah yang positif dalam upaya menghindari pungutan ilegal dari tukang parkir liar. Namun, mereka juga mengerti bahwa pembayaran masih dapat dilakukan dengan uang tunai, dan ada opsi pembayaran melalui OVO dan Dana, sehingga tetap memungkinkan bagi mereka yang lebih memilih membayar langsung dengan uang tunai.

³³ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna e-parkir di Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

4.2.3. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sebuah kegiatan atau penerapan kebijakan, tujuan program berperan sebagai panduan yang mengarahkan setiap langkah pelaksanaan dan keputusan yang diambil. Melalui evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program tersebut mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tujuan program memainkan peran penting dalam mengukur efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Dalam proses evaluasi, dilakukan pemantauan terhadap hasil yang telah dicapai dan perbandingan dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Jika program berhasil mencapai atau bahkan melebihi tujuan yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kesuksesan dan efektivitas program tersebut. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan awal, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebabnya dan membuat perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau tujuan sebetulnya cukup baik untuk Kota Banda Aceh, penerapan e-parkir ini bisa memberikan dampak khusus untuk pendapatan asli daerah, membantu mengurangi praktik pungli yang sering dilakukan oleh tukang parkir liar dan ketidakjujuran juru parkir saat laporan keuangan perharinya, selanjutnya meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan parkir yang lebih efisien. Dengan e-parkir, pembayaran menjadi lebih terstruktur dan transparan, mengurangi potensi kebocoran pendapatan yang mungkin terjadi dalam sistem parkir manual.”³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

Dari hasil wawancara di atas dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Penerapan sistem e-parkir di Kota Banda Aceh memiliki tujuan yang sangat positif. Ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, mengurangi praktik pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh tukang parkir ilegal, serta meningkatkan kejujuran dalam pelaporan keuangan harian oleh para juru parkir. Lebih lanjut, sistem e-parkir juga berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik dengan pengelolaan parkir yang lebih efisien. Dalam sistem e-parkir, pembayaran menjadi lebih terstruktur dan transparan, sehingga potensi kehilangan pendapatan yang mungkin terjadi dalam sistem parkir manual dapat diminimalkan.

Selanjutnya, Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga menerangkan hal yang sama di atas kepada peneliti, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebetulnya tujuan dari e-parkir ini memang cukup baik untuk memajukan Kota Banda Aceh dari sistem manual ke elektronik, itu menjadi salah satu tujuan, agar parkir ini juga dengan sistem modern, tujuan selanjutnya adalah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dari Parkir, jadi e-parkir ini penerimaan uangnya lebih akurat, menghindari juga sikap juru-juru parkir yang belum jujur saat penyeteroran uang kepada petugas Dishub.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di atas dapat dipahami bahwasanya tujuan dari penerapan e-parkir ini untuk memajukan Kota Banda Aceh dari sistem parkir manual ke sistem elektronik yang lebih modern. Salah satu tujuannya adalah agar sistem parkir menjadi lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

³⁵ Hasil wawancara dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh dari sektor parkir.

Dengan e-parkir, proses pengumpulan pendapatan menjadi lebih akurat, dan ini membantu menghindari praktik ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh sebagian juru parkir saat menyetor uang kepada petugas Dinas Perhubungan. Dengan demikian, e-parkir merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pendapatan daerah dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

4.2.4. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap para peserta program. Tujuan utama dari pemantauan program adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program serta mengidentifikasi hasil dan dampak yang telah dicapai. Dalam fase ini, pihak penyelenggara secara cermat mengamati seluruh aspek program, seperti efektivitas pelaksanaan, kualitas pelayanan, dan pencapaian tujuan program.

Pemantauan program melibatkan proses pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan program secara berkala. Dengan adanya pemantauan, pihak penyelenggara dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan program, sehingga dapat segera diatasi untuk memastikan kelancaran dan efisiensi program tersebut. Selain itu, pemantauan juga memungkinkan pengambilan tindakan korektif atau penyesuaian jika terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dan realisasi program.

Dengan melakukan pemantauan secara berkesinambungan, pihak penyelenggara dapat memastikan bahwa program berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang diharapkan, dan tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Selain itu, pemantauan juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peserta program, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan mendukung untuk Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi kawasan-kawasan kita ini dipantau CCTV, jadi satu tv ini mantau e-parkir semua, dibalik saya pantau lewat hp saya bisa mantau di tv, kalau ada mungkin anggota dilapangan tidak di *typing*, itu sebenarnya ada kamera langsung diportal, jadi kita tahu kalau mereka gak *typing* tiba-tiba portal terbuka, orang gak kasi karcis tiba-tiba portal terbuka, berarti ada permainan anggota diambil retur, ambil uang portal ditekan f4 mereka gak tau di hp saya *record* per 3 jam, jadi dia per 3jam dilaporkan ke kita per 3jam itu berapa ada masuk kendaraan, berapa ada keluar, berapa tiket gak di scan karena dia masuk notifikasi, jadi kalau ada pelanggaran langsung masuk notifikasi, jadi kita tau kalau ada anggota yang tidak scan berapa lembar, ada member, member ini penduduk yang ada dikawasan parkir yang kita jalankan.”³⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwasanya Kawasan-kawasan parkir kami dilengkapi dengan sistem pemantauan CCTV. Kemudian ada televisi yang dapat memantau semuanya dan juga dapat dipantau melalui ponsel Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Jika ada kecurangan, seperti mengambil uang dari portal dengan menekan tombol F4, pengawas memiliki

³⁶ Hasil wawancara dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

rekaman video setiap 3 jam di ponsel. Dengan demikian, setiap 3 jam, tim pengawas mendapatkan laporan tentang berapa banyak kendaraan yang masuk dan keluar, serta berapa banyak tiket yang tidak di-scan. Dengan sistem ini, dapat mendeteksi pelanggaran dengan cepat dan juga mengidentifikasi anggota yang tidak melakukan pemindaian tiket dengan benar.

Selanjutnya, Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

“Selain kita melakukan pemantauan melalui CCTV, kita juga sesekali turun kelapangan untuk memantau petugas-petugas kita yang bertugas disana, ya sekalian cek dilapangan dan menanyakan apakah ada masalah dengan sistemnya, ya ada beberapa kali saya turun kelapangan untuk mengecek keadaan.”³⁷

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan Penjaga Pos Parkir Kawasan P. Nyak Makam, beliau menjelaskan bahwa:

“E-parkir ini memang di pantau sama CCTV, jadi saya sesuai dengan ketentuan saja menjalankan tugas, ada juga dari kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesekali memantau kesini dan menanyakan kendala-kendala serta mengecek keadaan disini, tetapi kalau yang bersangkutan dengan karcis dan parkir ini memang dipantau sama mereka dari kantor.”³⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Penjaga Pos Parkir Kawasan P. Nyak Makam dapat dipahami bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak hanya mengandalkan pemantauan melalui CCTV dalam pengelolaan e-parkir, tetapi mereka juga secara berkala melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk

³⁷ Hasil wawancara dengan Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan Penjaga Pos Parkir Kawasan P. Nyak Makam pada tanggal 18 Agustus 2023

memantau para petugas yang bertugas di sana. Selama kunjungan ini, mereka melakukan pengecekan di lapangan dan berbicara dengan petugas untuk mengetahui apakah ada masalah dengan sistem dan apakah ada keluhan atau kendala yang perlu diatasi.

4.2.5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merujuk pada segala hal atau kondisi yang menghalangi, mengurangi, atau memperlambat suatu proses, aktivitas, atau tujuan tertentu. Penting untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang ada dan mencari cara untuk mengatasi atau menguranginya agar dapat mencapai tujuan dan potensi yang lebih besar.

Dalam konteks efektivitas, faktor penghambat merujuk pada elemen atau kondisi yang dapat menghambat atau mengurangi tingkat pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu tindakan atau proses. Ketika suatu organisasi, individu, atau sistem berusaha mencapai tujuan atau mencari hasil yang optimal, faktor penghambat dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai kesuksesan.

Pengenalan faktor penghambat ini menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Dengan mengatasi faktor penghambat, suatu permasalahan dapat diperbaiki sehingga mencapai performa yang lebih baik, mengoptimalkan hasil, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di Kota Banda Aceh, sistem pelayanan parkir elektronik menjadi solusi modern untuk mengelola parkir dengan lebih efisien dan efektif. Namun, implementasi dan melihat tingkat efektivitas sistem ini tidak lepas

dari beberapa faktor penghambat yang perlu dihadapi. Adapun faktor penghambat tersebut dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Internal

Faktor penghambat internal adalah kendala atau hambatan yang timbul dari dalam diri individu atau organisasi yang dapat menghalangi pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Faktor ini dapat berupa sikap, kebiasaan, kemampuan, atau keterbatasan yang dimiliki individu atau kelompok.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini non tunai belum bisa berjalan 100% di Banda Aceh karena regulasi, kita terkendala di regulasi, makanya saya lagi mencoba mencari celah untuk bisa kami gak korban, karena ada bahasa hukumnya begini, Saya memperkaya daerah bagus untuk karir saya, tapi dalam kasus hukum bekerja memperkaya orang lain tanpa ada aturan yang mengacu maka ada pidannya, makanya hari ini parkir nontunai baru bisa berjalan tok di 3 kawasan, yaitu di Jln. Ratu Safiatuddin daerah Soho lama, di Jln. P. Nyak Makam di daerah Bakso paknu, di Jln. Prof Ali Hasyimi di daerah Canai mamak pango, memang hari ini ada plus minus dalam penerapan e-parkir ini.”³⁹

Dari hasil wawancara di atas dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa implementasi pembayaran non-tunai di Banda Aceh masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan regulasi. Narasumber menyadari bahwa regulasi yang ada menjadi hambatan dalam mewujudkan pembayaran non-tunai secara penuh, sehingga sistem parkir non-tunai baru dapat diterapkan di tiga kawasan di Banda Aceh, yaitu Jln. Ratu Safiatuddin di daerah Soho lama, Jln. P. Nyak Makam di daerah Bakso Paknu, dan Jln. Prof Ali Hasyimi

³⁹ Hasil wawancara dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

di daerah Canai Mamak Pango. Narasumber juga menyadari bahwa penerapan e-parkir ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu diperhatikan dengan cermat dalam pengembangannya.

2. Eksternal

Faktor penghambat eksternal adalah hal-hal di luar kendali individu atau organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu proses. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kendala eksternal itu ada, saya mendapatkan laporan kadang sesekali bahwa ada masyarakat yang tidak patuh dan menerobos palang, itu sesekali ada laporan seperti itu, kalau penjaganya lagi ke toilet, ya karena masyarakat kita susah juga diatur dalam e-parkir ini, kemudian kalau mati lampu itu kan terkendala juga, gak bisa terkoneksi ke monitor layar kita.”⁴⁰

Selanjutnya, hal yang senada di atas juga disampaikan oleh petugas parkir kawasan Jln. Ratu Safiatuddin Peunayong kepada peneliti, beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk kendala sih mungkin dari masyarakatnya sendiri kadang parkir tidak beraturan dan masih banyak yang belum paham untuk pelayanan e-parkir ini, mungkin kendala lain seperti tadi ada yang terobos itu yang susah kan kami juga, dan yang menjadi kendala terakhir adalah kalau mati lampu, itu kan komputer ini tidak bisa hidup, itu saja sih.”⁴¹

Dari hasil wawancara di atas dengan Kabag Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Petugas Parkir kawasan Jln. Ratu Safiatuddin Peunayong dapat dipahami bahwa kendala eksternal yang dihadapi dalam implementasi sistem e-

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023

⁴¹ Hasil wawancara dengan petugas parkir kawasan Jln. Ratu Safiatuddin Peunayong pada tanggal 18 Agustus 2023

parkir. Pertama, narasumber menyebut bahwa terkadang mereka menerima laporan bahwa beberapa anggota masyarakat tidak patuh terhadap aturan e-parkir dan mencoba menerobos palang. Selanjutnya, kendala terakhir adalah ketika terjadinya pemadaman listrik, sistem e-parkir tidak dapat terkoneksi dengan monitor layar mereka.

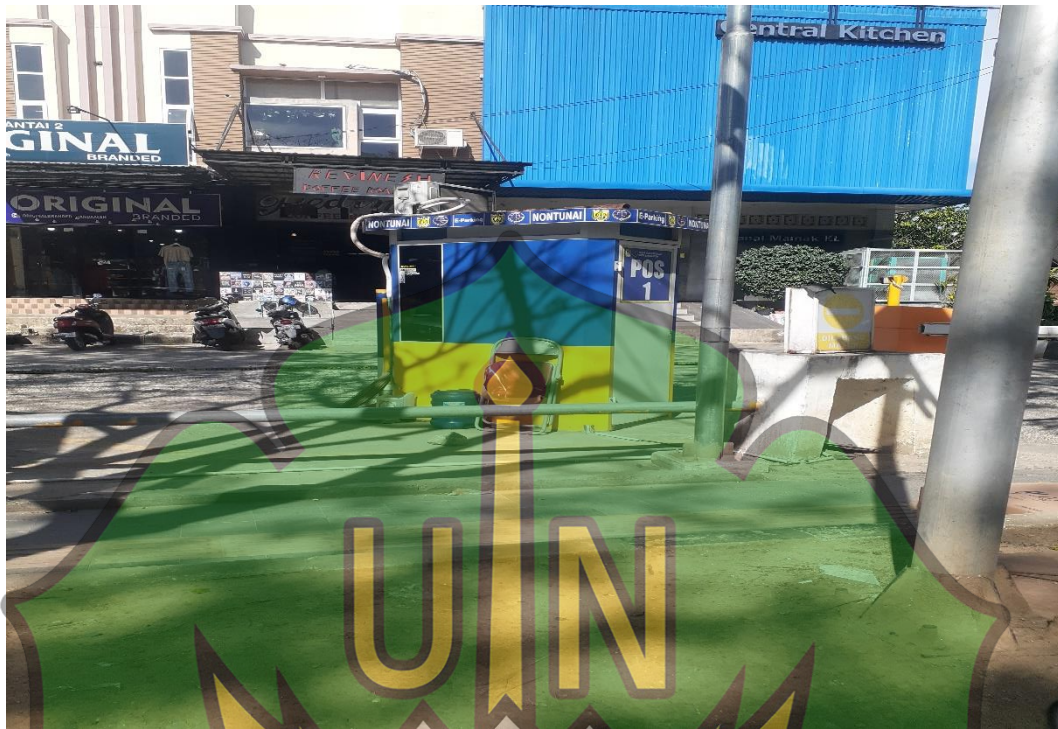
Dalam penelitian yang dilakukan terkait Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh, peneliti mengumpulkan data-data penelitian dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴²

⁴² Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini diambil dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan seperti dokumentasi yang didapatkan dilapangan saat melakukan observasi dan hasil-hasil wawancara dengan informan yang didapatkan melalui rekaman dan foto dengan informan penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini dapat lihat sebagai berikut:



Gambar 4.2 Palang E-Parkir Non-tunai



Gambar 4.3 Pos E-Parkir Non-tunai



Gambar 4.4 Suasana E-Parkir Non-tunai

4.3. Pembahasan Penelitian

4.3.1. Efektivitas Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh

Efektivitas sistem pelayanan parkir elektronik di Kota Banda Aceh dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengelolaan parkir di kota tersebut. Dengan adopsi teknologi modern ini, diharapkan terjadi perubahan positif dalam pengalaman pengguna, efisiensi operasional, serta pengelolaan parkir secara keseluruhan.

Dalam aspek pengelolaan, sistem e-parkir dapat memudahkan operasi dan pemantauan parkir bagi pihak berwenang. Data tentang pola parkir, jumlah pengguna, dan pendapatan dapat diakses dengan lebih mudah dan akurat. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam perencanaan pengembangan infrastruktur parkir di masa depan. Namun, untuk mencapai efektivitas penuh, beberapa aspek perlu diperhatikan.

Menurut Budiani untuk melihat efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel, diantaranya mengenai ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.⁴³ Adapun penjelasan tentang variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran program

Yakni sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya.

⁴³ Agrio Scivo Kowaas, Novie Pioh, Neni Kumayas, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, “Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon”, Volume 2 No. 2 Tahun 2017, Hlm: 4

b. Sosialisasi program

Yaitu melihat kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan program

Yakni kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Dari variabel di atas, jika ditinjau dari efektifitas sistem pelayanan parkir elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh, maka sungguh sangat baik bila dilihat dari sisi tersebut. Adapun kaitan dengan hasil penelitian dengan teori yang ditetapkan oleh peneliti mengenai efektifitas sistem pelayanan parkir elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem e-parkir di Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai penerapan teori indikator ketepatan sasaran program. Dalam teori tersebut, ditekankan pentingnya sejauh mana peserta program mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi e-parkir di Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa program ini bertujuan menggantikan sistem parkir manual dengan sistem yang lebih canggih

dan terstruktur, yang sesuai dengan sasaran program untuk mengembangkan sistem parkir yang lebih efisien.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa penerapan e-parkir telah berhasil mengurangi praktik pungli parkir yang dilakukan oleh juru parkir, mencerminkan pencapaian hasil yang lebih baik dalam hal ketepatan sasaran program, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa masih ada tantangan dalam mencapai ketepatan sasaran program secara menyeluruh, mengingat belum semua wilayah dapat menerapkan sistem e-parkir. Oleh karena itu, meskipun program ini telah memberikan hasil positif, perluasan program ini ke seluruh wilayah masih menjadi langkah yang perlu diambil untuk mencapai ketepatan sasaran program yang lebih luas.

2. Dalam tahap sosialisasi program, pihak penyelenggara program telah berhasil dalam melakukan sosialisasi program e-parkir di Kota Banda Aceh. Mereka meluncurkan program tersebut di akhir tahun 2022, dan sebulan sebelum pemberlakuan sistem nontunai, mereka sudah memulai proses sosialisasi melalui berbagai sarana, seperti baliho dan media elektronik. Selain itu, mereka juga memasang spanduk-spanduk di sekitar kawasan e-parkir untuk memberi tahu masyarakat tentang perubahan yang akan terjadi.

Dalam hal ini, pihak penyelenggara program telah berhasil dalam menyampaikan informasi mengenai pemberlakuan sistem nontunai

dengan menggunakan berbagai alat pembayaran seperti QRIS, OVO, Dana, Link Aja, dan e-money. Penyampaian informasi tersebut berguna untuk dapat masyarakat umum. Tetapi, ada kendala di dalam masyarakatnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sudah berlaku parkir elektronik di beberapa tempat di Banda Aceh.

3. Tujuan program penerapan sistem e-parkir di Kota Banda Aceh sangat positif. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, dan penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD tersebut. Ini mengindikasikan bahwa hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, e-parkir dapat memberikan kontribusi terhadap penertiban parkir di Kota Banda Aceh. Penerapan ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola dan keteraturan ruang parkir, mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan juru parkir. Dengan e-parkir, pengelolaan parkir diharapkan menjadi lebih efisien, menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur dan rapi.

Kemudian, tujuan program juga mencakup pengurangan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-parkir telah berhasil dalam mengurangi praktik pungli ini, yang menunjukkan kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan tujuan untuk mengatasi masalah ini.

Selanjutnya, tujuan program mencakup peningkatan kejujuran dalam pelaporan keuangan harian oleh para juru parkir. Penelitian juga mencatat bahwa program ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kejujuran dalam pelaporan keuangan harian. Ini menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program secara efektif mencapai tujuan ini.

4. Dalam tahap pemantauan program, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melengkapi kawasan-kawasan parkir dengan sistem pemantauan CCTV. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program.

Penerapan CCTV ini memiliki tujuan untuk memantau dan mengawasi kawasan parkir secara terus-menerus. Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan televisi yang dapat memantau semua kegiatan di kawasan parkir, bahkan dapat dipantau melalui ponsel Kabag Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Ini adalah contoh konkret dari upaya memberikan perhatian kepada peserta program, dalam hal ini, pengguna parkir. Dengan menerapkan pengawasan yang ketat dan responsif ini, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat mendeteksi pelanggaran dengan cepat dan mengidentifikasi anggota yang tidak melakukan pemindaian tiket dengan benar.

Aktivitas pengelolaan kendaraan di area parkir dengan menggunakan pendekatan waktu tiga jam sebagai interval pelaporan. Dalam konteks ini, setiap tiga jam, laporan secara rutin disampaikan kepada pihak yang berwenang, yang mencakup jumlah kendaraan yang

memasuki area parkir, jumlah kendaraan yang meninggalkan area parkir, dan jumlah tiket yang tidak berhasil dipindai karena masuknya notifikasi. Sistem notifikasi ini dirancang untuk mendeteksi pelanggaran, khususnya ketika anggota atau pengunjung tidak melakukan pemindaian tiket dengan benar.

Penerapan sistem notifikasi ini memberikan informasi yang akurat dan real-time terkait dengan potensi pelanggaran, memungkinkan pemilik area parkir untuk memantau kepatuhan anggota atau pengunjung. Adapun anggota yang dimaksud adalah penduduk yang terdaftar di kawasan parkir yang dikelola, dan pemantauan ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan area parkir tersebut.

4.3.2. Faktor Penghambat Dari Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh

Sistem pelayanan parkir adalah suatu rangkaian prosedur atau teknologi yang dirancang untuk mengatur dan menyediakan layanan parkir kepada pengguna kendaraan di suatu area tertentu. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola parkir, sehingga pengguna parkir dapat dengan mudah menemukan tempat parkir yang tersedia, membayar biaya parkir manual maupun konvensional, dan mendapatkan layanan yang baik.

Dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Parkir Elektronik masih belum berjalan begitu normal, dalam artian masih ada tantangan terhadap pelaksanaannya, terkhusus di Kota Banda Aceh. Penghambat dari sistem pelayanan parkir elektronik

dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dapat mencakup beberapa faktor yang dapat menghadirkan tantangan dalam implementasi dan adopsi teknologi ini.

Faktor penghambat merujuk pada segala hal atau kondisi yang menghalangi, mengurangi, atau memperlambat suatu proses, aktivitas, atau tujuan tertentu. Terdapat dua faktor penghambat dari Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh, yakni meliputi internal dan eksternal. Adapun urainnya faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.2.1. Faktor Internal

Faktor penghambat internal pada Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi atau entitas yang dapat menghambat kemajuan, efisiensi, atau pencapaian tujuan. Berikut adalah faktor penghambat internal yang terjadi pada Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh.

1. Faktor Regulasi

Salah satu kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah regulasi yang menghambat implementasi pembayaran non-tunai. Narasumber mengakui bahwa regulasi yang ada masih menjadi penghalang yang signifikan dalam mewujudkan pembayaran non-tunai secara penuh di Banda Aceh. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi pembayaran non-tunai dalam sistem parkir.

4.3.2.2. Faktor Eksternal

Faktor penghambat eksternal dalam konteks pengelolaan sistem pelayanan parkir elektronik di Kota Banda Aceh merupakan faktor-faktor yang terjadi di luar kendali dari pihak pelaksana e-parkir di Kota Pemerintah. Adapun faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Masyarakat

Kendala eksternal yang disoroti adalah pelanggaran oleh masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan parkir elektronik, termasuk perilaku tidak patuh seperti menerobos palang. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat untuk mengikuti aturan dan memanfaatkan sistem e-parkir dengan baik. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap aturan parkir elektronik dan dampak dari pelanggaran tersebut terhadap pengelolaan parkir yang efisien.

2. Masalah Kelistrikan

Dalam pelayanan sistem parkir elektronik, hal yang diluar kendali dari pihak pelaksana e-parkir ini adalah masalah kelistrikan yang memengaruhi kinerja sistem parkir elektronik. Ketika listrik mati, komputer tidak dapat berfungsi, yang berarti sistem parkir elektronik tidak dapat terkoneksi atau digunakan dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya investasi dalam infrastruktur cadangan seperti sistem daya darurat atau generator untuk menjaga kelancaran operasi sistem parkir, terutama dalam situasi darurat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Efektivitas Sistem Pelayanan Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh telah berjalan sekitar 1 tahun di Kota Banda Aceh, tetapi dalam pelaksanaannya sistem e-parkir ini masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pengguna parkir yang masih belum mengetahui mengenai sistem pembayaran online yang diterapkan di parkir tersebut, beranjak dari hal tersebut pihak penjaga pos parkir memberikan kelonggaran untuk menerima pembayaran uang cash atau uang tunai. Meskipun ada upaya sosialisasi yang cukup baik, efektivitasnya dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan sistem non-tunai mungkin masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat literasi digital dan aksesibilitas terhadap alat pembayaran elektronik. Dalam konteks ini, efektivitas pemberlakuan e-parkir di Kota Banda Aceh mungkin belum dapat dianggap sebagai pencapaian yang sepenuhnya efektif dalam mencapai semua tujuan yang ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh, terdapat faktor penghambat yang dapat menghambat kemajuan, efisiensi, atau pencapaian tujuan. Faktor penghambat ini dapat dibagi

menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal meliputi masalah regulasi yang menghambat implementasi pembayaran non-tunai dalam sistem parkir elektronik. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi menjadi penting untuk mendukung penggunaan teknologi pembayaran non-tunai dalam sistem parkir. Sementara itu, faktor penghambat eksternal melibatkan pelanggaran oleh masyarakat, kurangnya pemahaman tentang sistem parkir elektronik, dan perilaku tidak patuh seperti menerobos palang. Selanjutnya, masalah kelistrikan juga merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja sistem parkir elektronik.

5.2. Saran

Pemerintah Kota Banda Aceh:

1. Pemerintah perlu mengadakan kampanye sosialisasi yang intensif tentang sistem pelayanan parkir elektronik kepada masyarakat. Melalui kampanye ini, menjelaskan secara menyeluruh tentang manfaat dan cara menggunakan teknologi ini. Gunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, papan pengumuman, dan sosial media, untuk mencapai khalayak yang lebih luas.
2. Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas internet yang stabil untuk mendukung sistem parkir elektronik. Pastikan ada cukup titik pemasangan alat pembayaran dan akses internet yang handal di seluruh area parkir yang diatur.

Masyarakat:

1. Pahami cara penggunaannya mengenai sistem pelayanan parkir elektronik dan manfaat yang ditawarkan. Dengan menggunakan sistem ini, kita dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.
 2. Patuhi peraturan dan kebijakan terkait penggunaan sistem parkir elektronik. Dukung pemerintah dalam memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
 3. Berikan masukan terkait pengalaman Anda menggunakan sistem parkir elektronik di Kota Banda Aceh atau di tempat lainnya. Hal ini dapat membantu pemerintah dan operator parkir untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan sistem pelayanan parkir elektronik di Kota Banda Aceh.
- Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat, diharapkan efektivitas sistem pelayanan parkir elektronik dapat meningkat dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eulin Karlina Rosento (2020), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardani, Ddk, (2000), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv, Pustaka Ilmu.
- Prof. Dr. H. Abdurrahmat Fathoni, M.Si., Prof. Dr. H.M. Abdul Somad, M.Pd., Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia (Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Kinerja Pegawai, Pengawasan)*, Jatinangor, Alqaprint Jatinangor.
- Salim, Syahrin (2012), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Citapustaka Media.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Skripsi/Jurnal:

- Agrio Scivo Kowaas, Novie Pioh, Neni Kumayas (2017), *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon*, Volume 2 No. 2.
- Al Mufakkir Budiman (2022), *Skripsi, Peran pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa paya kecamatan trienggadeng kabupaten pidie jaya*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Arnild Augina Mekarisce (2020), "*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*", *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3
- Aulia Billqis, Retno Suryawati (2022), *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta*, Volume 2, Nomor 2.
- Bayu Arief Rachman (2023), *Skripsi, Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Dalam Mendapatkan Penghargaan Pelayanan Prima Grade A*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Jemadil (2022), Skripsi, *Peran DISHUB Dalam Penertiban Perparkiran Di Kota Blangkejeren Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir Dan Siyasa Syari'ah*. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mubdi Dzuwhandy (2022), Skripsi, *Efektifitas Penggunaan Sistem Pemungutan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makasar*, Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Musyarrifah (2021), Skripsi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di SMP Aisyiah Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Naufal Imaduddin (2021), Skripsi, *Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Tentang Program Terminal Parkir Elektronik di Jl. Burangrang)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Silvanda, Handri (2021). *Efektivitas sistem parkir elektronik (e-parkir) dalam pengelolaan parkir di kota surakarta*. *Journal of Governance and Policy Innovation*. Vol 1, No 1.

Yogi Eka Prastiya (2014), Skripsi, *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*. Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Zahratin Nadira (2021), Skripsi, *Efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor MK 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

Website :

3 Kawasan di Banda Aceh mulai berlakukan sistem parkir elektronik di akses di <https://www.ajnn.net/news/dishub-banda-aceh-mulai-berlakukane-parkir/index.html>. Pada 02 Juli 2023.

Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di akses di <https://Dishub.Bandaacehkota.Go.Id/PageSejarah.Html>. Pada Tanggal 20 Juli 2023



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2745/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022

TENTANG

PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 30 September 2022
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk Saudara
 1. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Muhammad Zulhimi
 NIM : 180802023
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

an. Rektor
 Dekan,

Muji Mulia

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1343/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Bagian Bidang Perparkiran
2. Seksi Pengawasan dan pengendalian parkir

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD ZULHILMI / 180802023**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gp Emperum Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas sistem pelayanan parkir elektronik (E-Parkir) dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Januari 2024 **UIN** Eka Janat, M.Soc.Sc.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Wawancara Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh



Wawancara Bagian Pengawasan perparkiran DISHUB Kota Banda Aceh



Wawancara Petugas Pos Parkir di kawasan Jalan P.Nyak Makam



Wawancara Petugas pos parkir di kawasan Jalan Prof. Ali Hasyimi



Wawancara Petugas Pos Parkir di Kawasan Jalan Ratu Safiatuddin



Wawancara Masyarakat Pengguna E-parkir



Wawancara Masyarakat Pengguna E-Parkir



Wawancara Masyarakat Pengguna E-Parkir

